BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam pembahasan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak didirikan, Komnas HAM mengalami evolusi dalam landasan hukumnya. Awalnya, dibentuk oleh Keppres Nomor 50 Tahun 1993, namun landasan ini di rasa kurang kuat. Surat Presiden RI Nomor: R.09/PU/1999 kepada DPR RI mengenai RUU HAM menjadi landasan untuk pembentukan regulasi khusus yang membahas Komnas HAM. RUU ini mengatur kewenangan Komnas HAM seperti pemantauan, penyelidikan dan memberikan rekomendasi. Pada 8 September 1999, RUU tersebut disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang mengatur tugas dan fungsi Komnas HAM, termasuk sebagai pos pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran HAM. Fungsi Komnas HAM juga diatur dalam undang-undang lain, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Meskipun Komnas HAM adalah lembaga independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, harus mempertanggungjawabkan tindakannya kepada DPR RI, Presiden RI dan Mahkamah Agung.
2. Perubahan UUD 1945 menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, diwujudkan melalui prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Komnas

HAM berperan dalam memastikan perlindungan HAM di Indonesia dengan fungsi-fungsinya, termasuk pengkajian, penyuluhan, pemantauandan mediasi. Namun, dalam ranah penyelidikan di Pengadilan HAM, keterbatasan wewenang menyulitkan Komnas HAM dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM. Meskipun dapat mengeluarkan rekomendasi, Komnas HAM dianggap "*tiger toothless*" karena tidak memiliki kewenangan penegakan jika rekomendasinya diabaikan. Untuk memastikan efektivitasnya, perluasan kewenangan Komnas HAM menjadi penting agar dapat menjamin perlindungan HAM secara optimal, sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas, adapun saran-saran yang dapat diberikan untuk proses pembelajaran dan perbaikan kedepannya antara lain :

1. Komnas HAM perlu diberi kewenangan lebih agar dapat menyelesaikan pelanggaran HAM secara lebih efektif. Selain memberikan rekomendasi, Komnas HAM seharusnya juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran HAM. Hal ini akan membantu dalam membuat para pelaku pelanggaran HAM merasa terdorong untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara lebih serius.
2. Pembentukan payung hukum khusus untuk Komnas HAM sangat penting. Hal ini akan memungkinkan pengaturan yang lebih detail dan

menyeluruh terkait fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Komnas HAM. Dengan memiliki undang-undang yang terpisah, Komnas HAM dapat beroperasi secara lebih efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hak asasi manusia.